**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan kondisi sosial kemasyarakatan menjadi sangat kompleks dan bersifat multidimensional. Dampak negatif dari krisis ekonomi adalah menurunnya tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga meningkatnya jumlah penduduk yang miskin. Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengembangkan berbagai program dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 pemerintah daerah adalah Gurbenur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa; pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kota/ Kabupaten yaitu:

a. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. Penanganan masalah sosial (lintas Kabupaten/Kota )

1

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 Ayat 1 dan Pasal 14 Ayat 1, demikian pula dalam

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam menyelengarakan 1

otonomi, daerah mempunyai kewajiban, antara lain:

1. Melindungi masyarakat menjaga pesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam rangka upaya Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, maka diterbitkan Keputusan Presiden RI No. 124 Tahun 2001, tentang pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) dan diterbitkannya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan tahun 2004.

Daulay dkk, (2005:2) Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan dalam upaya penanggulangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian belum dapat mengungkapkan permasalahan kemiskinan tersebut. Maka pemerintah merencanakan program penyelenggara BLT, dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, miskin, sangat miskin. BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut di tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia. Dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan,

meskipun timbul kontroversi dan kritik. Selain itu, beberapa pihak mengatakan program BLT juga dianggap sebagai program pembodohan masyarakat yang merubah mental bangsa menjadi pemalas, peminta-minta, dan manja. Uang yang diberikan dari program tersebut juga dapat disalahgunakan oleh rakyatnya sendiri, seperti membeli rokok, minum-minuman, atau hal-hal yang melanggar tujuan utama dari program BLT. Kebanyakan pula penerima BLT bukan hanya orang-orang yang tidak mampu melainkan orang yang mampu mendapatkan BLT itu sendiri sehingga banyak terlalu mendapatkan bantuan yang tidak layak.

Tetapi, ada juga beberapa kalangan yang mendukung program BLT. Mereka berpendapat program BLT adalah program yang mampu membantu masyarakat miskin. Meskipun tidak berpengaruh langsung dari segi daya beli masyarakat, uang tunai tersebut dapat menjadi tabungan dan modal usaha bagi warga miskin. Jadi program BLT mampu meningkatkan kesejahteraan sebagian kecil masyarakat, meskipun penyalurannya belum sepenuhnya efektif. Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat ke-3, mendukung program BLT. Menteri Perdagangan dan Menteri Pembangunan Nasional mengatakan, program BLT pada tahun 2005 hanya terjadi sekitar lima hingga enam persen kegagalan, sedangkan 95 persen lainnya tepat sasaran. Dukungan serupa terhadap BLT juga disampaikan oleh Anas Urbaningrum, ketua Partai Demokrat ke-3, yang menekankan bahwa program tersebut harus dilihat dari asas manfaat. Dia menambahkan, pandangan ini penting karena untuk mempertahankan daya beli masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama setelah BBM dinaikkan.

Melihat dari penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena masyarakat miskin di Indonesia pada masa sekarang ini sudah sangat melonjak dibandingkan pada dasawarsa sebelumnya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Efektivitas Dana Masyarakat Yang Kurang Mampu di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

**B. Identifikasi Masalah**

Dengan memperhatikan masalah-masalah yang melatar belakangi masalah dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan diantaranya :

1. Pembagian tidak merata disebabkan data yang digunakan adalah data lama.
2. Terdapat indikasi adanya penjatahan jumlah rumah tangga target sampai di tingkat RT.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah “ Berapa Besar Pengaruh Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Efektivitas Dana Masyarakat Yang Kurang Mampu di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”?

**D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Besar Pengaruh pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Efektivitas Dana Masyarakat Yang Kurang Mampu di Desa Mattirowalie di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”?

**E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan latihan dalam mengungkapkan dan menganalisis yang sistematis dalam memecahkan masalah yang terdapat di dalam masyarakat.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dpat menjadi bahan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan langsung tunai dalam efektivitas masyarakat kurang mampu.
3. Bagi pemerintah/institusi yang terkait. Dapat menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran sehingga umpan balik untuk meningkatkan pelayanan.